CASSOWARY Volume 2 (2): 114 - 127

ISSN : 2614-8900 E-ISSN : 2622-6545

©Program Pascasarjana Universitas Papua, https://pasca.unipa.ac.id/

# Kajian pelaksanaan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Papua Barat

Study of implementation of forest and land fire prevention activities in West Papua Province

Tasurruni\*, Bambang Nugroho, Rudi A Maturbongs

Jln. Essau Sesa Sowi Gunung / Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (BPPIKHL) Wilayah Maluku Papua

e-mail: tasurruni82@gmail.com

**ABSTRACT:** West Papua Province with total burned area of 8.211 Ha covering 2.792 Ha of peatland and 5.429 Ha non-peatland area. The impact of these fires are a very thick smog for a few days. The event was supported by El Nino phenomenon, in some regions, there has been a decreasing of rainfall which causes a prolonged dry season (forest and land fire). The Ministry of Environment and Forestry (KLHK) through the Center of Climate Change and Forest and Land Fire (BPPIKHL) for Maluku and Papua acting as Technical Implementation Unit (UPT) in the region, increasing the activities for forest and land fire prevention. Considering the 4 provinces work area with limited personnel, it is necessary to study the implementation of forest and land fire prevention activities. The study aims to examine the activities of forest and land fire prevention carried out by the Government, particularly BPPIKHL for Maluku and Papua in West Papua Province in relation to decreasing forest and land fires. In accordance to the studied problems, the approaching which used in this study is quantitative qualitative approach. The prioritized policy is the implementation of prevention in the site level. BPPIKHL for Maluku and Papua has carried out the activities well and effectively directly to the site level through prevention activities, which decreas the hotspots.

Keywords: BPPIKHL Maluku Papua, Forest and Land Fires, Prevention

ABSTRAK: Provinsi Papua Barat dengan total area terbakar 8.211 Ha yang meliputi 2.792 Ha lahan gambut dan 5.429 Ha bukan lahan gambut. Dampak kebakaran ini adalah kabut asap yang sangat tebal selama beberapa hari. Hal ini didukung oleh fenomena El Nino, di beberapa daerah, telah terjadi penurunan curah hujan yang menyebabkan musim kemarau yang berkepanjangan (kebakaran hutan dan lahan). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Pusat Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (BPPIKHL) untuk Maluku dan Papua bertindak sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah tersebut, meningkatkan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Mengingat 4 wilayah kerja provinsi dengan personil yang terbatas, perlu untuk mempelajari implementasi kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah, khususnya BPPIKHL untuk Maluku dan Papua di Provinsi Papua Barat terkait dengan penurunan kebakaran hutan dan lahan. Sesuai dengan masalah yang diteliti, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif kuantitatif. Kebijakan yang diprioritaskan adalah penerapan pencegahan di tingkat situs. BPPIKHL untuk Maluku dan Papua telah melakukan kegiatan dengan baik dan efektif langsung ke tingkat lokasi melalui kegiatan pencegahan, yang mengurangi titik api.

Kata Kunci: BPPIKHL Maluku Papua, Kebakaran Hutan dan Lahan, Pencegahan

#### **PENDAHULUAN**

Kebakaran hutan di Indonesia bukan lagi merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia karena sering terjadi setiap tahun. Seperti kondisi pada tahun 2015 berdasarkan data dari BNPB, Indonesia menganggap bencana nasional kebakaran hutan dan lahan. Di saat itu terjadi banyak kebakaran hutan yang tidak bisa dikendalikan oleh semua pihak terkait. Belajar dari pengalaman penanggulangan kebakaran hutan dan di wilayah Provinsi Papua Barat dengan luas areal yang terbakar mencapai 8.211 Ha meliputi lahan gambut 2.792 Ha dan non gambut 5.429 Ha. Dampaknya terjadi kabut asap yang sangat tebal dalam beberapa hari. Hal tersebut didukung dengan adanya fenomena El Nino, di beberapa wilayah mengalami penurunan curah hujan yang menyebabkan musim kering yang berkepanjangan. lahan (karhutla), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (BPPIKHL) Maluku Papua selaku Unit Pelaksana Teknis di daerah, meningkatkan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan hingga ke tingkat tapak diwilayah kerja yang mencakup 4 provinsi termasuk di wilayah Provinsi Papua Barat. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergitas berbagai pihak dalam upaya pengendalian kebaka-ran hutan dan lahan (karhutla) khususnya masyarakat.

Selama berdirinya BPPIKHL Maluku Papua, berbagai program telah dilaksanakan dalam pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Maluku dan Papua. Program kegiatan yang dijalankan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan meliputi pemantauan hotspot, pembentukan dan Masyarakat Peduli Api pembinaan (MPA), patroli mandiri, patroli terpadu, kampanye pencegahan karhutla ke sekolah-sekolah, sosialisasi kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan tersebut dijalankan dalam rangka menurunkan luasan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Sudah saatnya pencegahan kebakaran hutan dan lahan ditangani secara terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan. Luasnya wilayah BPPIKHL meliputi pulau Maluku dan Papua dengan jumlah pegawai 30 orang dan dana pencegahan yang fluktuatif setiap tahun sehingga perlu diketahui pelaksanaan kegiatan pencegahan sudah baik dan efektif dalam menurunkan karhutla.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya BPPIKHL Maluku Papua di Provinsi Papua Barat dalam kaitannya penurunan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

#### METODE PENELITIAN

#### Lokasi, Waktu dan Alat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan pada bulan November sampai Desember 2018. Penelitian dilaksanakan di kantor BPPIKHL Maluku Papua yang terletak di Manokwari dan wilayah pelaksanaan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan meliputi Kota Sorong, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Tambrauw. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah ATK, kamera digital, laptop, papan lapangan dan printer. Dan bahan yang digunakan adalah daftar pertanyaan.

## Rancangan dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriftif kuantitatif kualitatif. Jumlah populasi pada penelitian ini meliputi 29 orang pegawai BPPIKHL Maluku Papua dan 120 MPA dari 8 kelompok MPA. Wawancara dilakukan pada pegawai dengan metode sensus dan MPA dengan dengan metode pengambilan sampel berdasarkan rumus slovin yang diperoleh 55 orang. Teknik Pengambilan sampel dilakukan dengan Purposive Sampling agar bisa mendapatkan sampel responden yang benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif kualitatif. Prosedur penelitian terdiri atas tahap persiapan, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap perumusan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulkan data yang diperlukan melalui studi literatur, studi dokumen, wawancara langsung, observasi dan menganalisa hasilnya.

#### **Variable Pengamatan**

Variabel dan data yang diamati merupakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Papua Barat meliputi data hotspot Papua Barat tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, kondisi dan kebiasaan masyarakat dalam kaitannya karhutla, daerah rawan karhutla, kegiatan pencegahan karhutla sebagaimana Tabel 1.

#### **Analisis Data**

Analisis penelitian ini meliputi:

- a. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.
- b. Bentuk penyajian data kuantitatif dan kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), tabel, grafik, jaringan dan bagan.
- c. Penarikan Kesimpulan

Tabel 1. Kegiatan Pencegahan Karhutla BPPIKHL Maluku Papua

Kegiatan	Jumlah dan	Peralatan	Personil/	Materi
	Sebaran		Peserta	
Pembentukan dan pembinaan MPA	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
Patroli Mandiri	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	
Patroli Terpadu	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	
Sosialisasi Karhutla	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
Kampanye karhutla di sekolah	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Potret dan Fakta Prov. Papua Barat

Wilayah Provinsi Papua Barat memiliki luas 99.671 km² (BPS,2016).Papua Barat terbagi menjadi 21 bentuk tutupan lahan yang berbeda dari tempat satu ke tempat lain bergantung kondisi fisik/ling-kungan setempat. Merujuk data dari Pusat

Pengendalian Pembangunan E-koregion (P3E) Papua pada pengelompokan penutup lahan berdasarkan batasan pengertian tentang penutup lahan menurut SNI 7645-2010. Besar tutupun lahan yang mempunyai potensi terbakar di Provinsi Papua Barat mencapai 57,22 %, itupun belum termasuk hutan lahan tinggi yang

dikelola perusahaan dan dirambah masyarakat. Tutupan lahan ini dapat dijadikan acuan dalam penentuan da-erah rawan kebakaran hutan.



Gambar 1. Kondisi tutupan lahan di kebar

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan jumlah IUPHHK di Provinsi Papua Barat sebanyak 21 perusahaan dengan luasan areal 2.848.578 ha telah mengelola hutan. Pemberian ijin terhadap perusahaan untuk mengelola hutan dan lahan memberikan potensi besar pada kebakaran hutan dan lahan, belajar dari pengalaman pulau sumatera dan Kalimantan berdasarkan data Walhi tahun 2015 ada 71 perusahaan yang melakukan pembakaran

Setiap perusahaan yang membuat tim pengendalian kebakaran hutan hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan nomor: P.12/Menhut-II/2009 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. BPPIKHL Maluku Papua telah melakukan upaya menyurati seluruh perusahaan agar membentuk tim pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Respon 2 perusahaan sudah baik seperti PT. Wijaya Sentosa di Wasior dan PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries di Nabire bersama BPPIKHL Maluku Papua membentuk tim pengendalian kebakaran hutan dan Lahan atas permintaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Masih ada 18 perusahaan yang belum memberikan respon, padahal hal ini merupakan kewajiban mereka.

Yang juga menjadi perhatian adalah lahan gambut di Provinsi Papua Barat. Sebagaimana kita ketahui lahan gambut mudah terbakar karena mengandung bahan organik didalamnya. Terlebih lagi pengelolaan yang salah dapat memperburuk keadaan dari lahan gambut tersebut. BPPIKHL Maluku Papua sebaiknya sudah mulai menyampaikan ke perusahaan-perusahaan di lahan gambut agar menjaga wilayahnya dari kebakaran hutan dan lahan dan menyurati untuk mewajibkan mempunyai tim pengendali kebakaran hutan dan lahan, begitu pula pada bisnis kelapa sawit di Provinsi Papua Barat sudah sangat banyak beroperasi (Y. L. Frangky, 2015). Pada tahap pembukaan lahan untuk persiapan penanaman biasanya dilakukan pembabatan habis tanaman dan cara paling ringkas adalah membakar.

Dengan data-data di atas bukan hal tidak mungkin kawasan Papua Barat akan senasib dengan kawasan di Sumatera dan Kalimantan yang setiap tahun menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan di tahun mendatang. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan harus menjadi prioritas sebelum hal tersebut terjadi dengan dukungan dari seluruh elemen baik masyarakat maupun pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terlihat masyarakat membuka lahan untuk kebun baru dengan menebang hutan dan memba-kar kayu bekas tebangan. Mereka menyatakan bahwa cara yang paling cepat membersihkan kebun dengan membakar tanpa harus mengeluarkan tenaga mengangkut sisa hasil tebangan dan merupakan kebiasaan turun temurun. Mereka memanfaatkan kemarau untuk melakukan pembakaran lahan, hal ini bisa menjadi potensi terjadi kebakaran yang meluas. Salah satu upaya yang dilakukan oleh

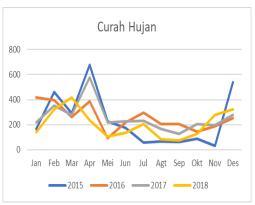
BPPIKHL Maluku Papua adalah kegiatan penyuluhan yang biasa dilakukan kepada pelaku pembakaran yang ditemukan dilapangan merupakan bagian dari kegiatan patroli mandiri dan terpadu diharapkan dapat memberi kesadaran kepada masyarakat tersebut.



Gambar 2. Areal pembukaan lahan

#### Kondisi Cuaca Provinsi Papua Barat

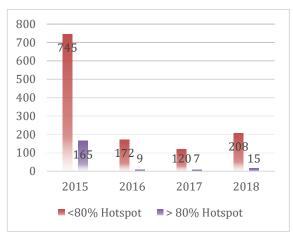
Menurut Mackinno et al.(1997) dalam Hadiwijoyo (2012), bulan basah ditandai dengan curah hujan >200 mm/bulan, sedangkan bulan kering ditandai oleh curah hujan <100 mm/bulan. Berdasarkan data yang didapatkan dari BMKG tahun 2015, pada tahun 2015 bulan kering terjadi di bulan Juni sampai November sehingga hal ini yang menimbulkan kebakaran yang cukup besar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Syaufina (2008) bahwa kekeringan berhubungan erat dengan kejadian kebakaran hutan yang besar di beberapa tempat di bumi. Kekeringan menyebabkan kadar air vegetasi turun sehingga dapat menyebabkan tanaman mati, kayu besar kehilangan kadar air dan potensi kebakaran menjadi tinggi. Di tahun 2016 bulan kering terjadi pada bulan Mei saja. Tahun 2017 tidak terdapat curah hujan <100 mm sedangkan tahun 2018 terjadi bulan kering pada bulan Agustus dan September.



Gambar 3. Grafik Curah hujan 2015 s/d 2018 (BMKG,2018)

Dapat dilihat, pada grafik Gambar 3, dalam 4 tahun terakhir terlihat rata-rata curah mulai rendah dari bulan Mei sampai bulan November, pada saat tersebut kegiatan pencegahan baik dilakukan karena sangat rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Pemantauan hotspot merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BPPIKHL Maluku Papua yang dijadikan sebagai salah satu indikator terjadi kebakaran hutan dan lahan. Terkadang pula dilakukan groundcheck hotspot pada lokasi yang dianggap mudah di akses oleh kendaraan. Jumlah hotspot bervariasi pada setiap bulan terjadi karena kondisi cuaca dan iklim yang ada di lokasi tersebut. Berdasarkan pemantauan hotspot dalam 4 tahun terakhir, jumlah hotspot tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebanyak 745 titik dengan jumlah hotspot >80% sebanyak 165 titik dimana terjadi banyak kebakaran hutan dan lahan.



Gambar 4. Grafik Curah hujan 2015 s/d 2018 ( Lapan, 2018)

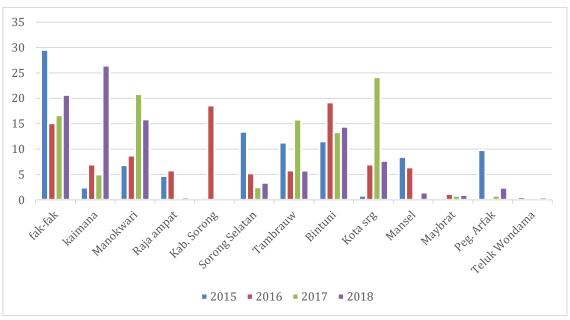
Fenomena El Nino yang terjadi pada tahun 2015 menyebabkan terjadi banyak kebakaran diwilayah Provinsi Papua Barat. Berdasarkan analisis luas hutan dan Lahan Terbakar di Indonesia tahun 2015 oleh BNPB di Papua Barat daerah yang terbakar seluas 8.211 Ha, meliputi lahan gambut 2.791 Ha, non gambut 5.429 Ha.

Berdasarkan lokasi sebaran hotspot dari 4 tahun terakhir yang diamati, daerah yang setiap tahunnya memiliki banyak hotspot adalah

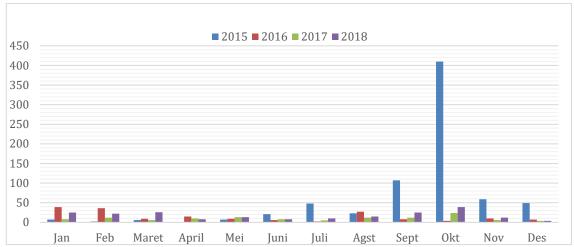
a. Distrik Kokas dan Bomberay Kabupaten Fak-Fak

- b. Distrik Babo, Sumuri dan Moskona Selatan Kabupaten Bintuni.
- c. Distrik Teluk Etna dan Buruway Kabupaten Kaimana
- d. Kecamatan Sorong Barat Kota Sorong
- e. Distrik Kebar dan Senopi Kabupaten Tambrauw
- f. Distrik Ransiki dan Momiwarem Kabupaten Manokwari Selatan
- g. Distrik Inanwatan Kabupaten Sorong Selatan
- h. Distrik Warmare, Prafi dan Masni Kabupaten Manokwari

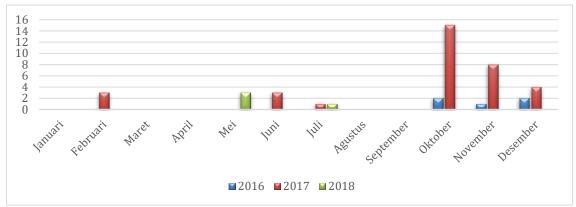
Berdasarkan data pantauan hotspot bulanan, BPPIKHL Maluku Papua harus lebih waspada pada bulan-bulan yang tinggi yaitu Januari, Februari, Agustus, September dan Oktober. Pada bulan Oktober merupakan puncak dari hospot dari 4 tahun pengamatan. Sebaiknya BPPIKHL Maluku Papua lebih banyak melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan pada bulan yang memiliki tingkat hotspot tinggi.



Gambar 5. Grafik Hotspot Per Kabupaten Tahun 2015 s/d 2018 (Lapan, 2018)



Gambar 6. Grafik Bulanan Hotspot 2015 s/d 2018 (Lapan, 2018)



Gambar 7. Grafik Kegiatan Pencegahan BPPIKHL Maluku Papua 2015 s/d 2018

## Kegiatan Pencegahan Karhutla oleh BPPIKHL Maluku Papua di Prov. Papua Barat.

Kegiatan Pencegahan Karhutla di Provinsi Papua Barat telah dilakukan selama 3 tahun terakhir mulai dari tahun 2016 s/d tahun 2018. Kegiatan pencegahan ini dilakukan secara berulang pada wilayah Kota Sorong, Distrik Momiwarem Kabuapten Manokwari Selatan dan Distrik Kebar Kabupaten Tambrauw padahal ada beberapa kabupaten yang juga rawan kebakaran hutan dan lahan yang harusnya menjadi perhatian BPPIKHL Maluku Papua.Kabupaten yang dimaksud yaitu Kabupaten Fakfak, Kabupaten Bintuni dan Kabupaten Kaimana.

Kegiatan pencegahan karhutla meliputi:

#### a. Sosialisasi Karhutla

Kegiatan sosialisasi kebakaran hutan dan lahan merupakan kegiatan yang

memberikan arahan tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan dan cara pencegahannya kepada masyarakat. Kegiatan ini juga dapat dikatakan sebagai kegiatan perkenalan BPPIKHL Maluku Papua terhadap masyarakat bahwa telah dibentuk balai yang akan mengurusi masalah kebakaran hutan dan lahan.

## b. Kampanye Karhutla di sekolahsekolah

Sasaran kegiatan kampanye karhutla generasi muda didaerah rawan kebakaran hutan dan lahan dimaksudkan agar generasi muda dapat peduli terhadap lingkungan dalam hal kebakaran hutan dan lahan.

Sesuai arahan dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kegiatan ini tidak dilakukan pada tahun 2018 karena kegiatan pencegahan difokuskan pada patroli terpadu, pembinaan MPA dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan

## c. MPA (Masyarakat Peduli Api)

Berdasarkan amanat Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.3/PPt/SET/Kum.1/1/2018 tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api, maka salah satu langkah yang dapat diupayakan adalah menggugah kesadaran dan bekerja sama dengan masyarakat desa penyangga untuk berperan aktif dalam upaya menanggulangi dan mengatasi terjadinya kebakaran hutan.

Lokasi pembentukan MPA ditentukan berdasarkan informasi yang didapat dari instansi terkait dan masyarakat. Dalam wilayah kerja masing-masing MPA diberikan tanggung jawab minimal tidak ada kebakaran di daerah tempat tinggal mereka. MPA tersebut melaksanakan tugasnya dengan alat pemadaman seadanya berupa ranting-ranting pohon sehingga dinilai sangat berbahaya bagi keselamatan kerja. Masyarakat harusnya dilengkapi dengan peralatan standar pemadaman kebakaran agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab memadamkan api dengan aman. Hal tersebut telah diusahakan oleh BPPIKHL Maluku Papua dengan bersurat kepada Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyatakan permintaan peralatan standar kebakaran dan sampai saat ini belum

Pelaksanaan pembinaan MPA setelah setahun pembentukan MPA. Pembinaan ini hanya dilaksanakan pada wilayah Distrik Kebar di tahun 2018. Seharusnya semua MPA yang telah terbentuk perlu dilakukan pembinaan setiap tahunnya, selain untuk meningkatkan keterampilan masyarakat peduli api dalam berbagai hal juga dapat memberikan semangat baru untuk menjaga daerahnya dari kebakaran hutan dan lahan.



Gambar 8. Praktek Pembinaan MPA di Kebar (BPPIKHLMaluku Papua,2018)

#### d. Patroli Mandiri

Tahun 2016 merupakan awal pelaksanaan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dimana kegiatan patroli mandiri hanya dilakukan di wilayah yang dapat dijangkau dengan mobil. Pelaksana kegiatan semua personil BPPIKHL Maluku Papua yang dibagi dalam 6 orang setiap tim. Kegiatan Patroli Mandiri pada tahun 2017 berbeda dari tahun sebelumnya karena sudah melibatkan masyarakat. Kegiatan patroli mandiri melibatkan MPA yang telah dibentuk sebelumnya sebagai pelaksana. Petugas dari BPPIKHL Maluku Papua hanya sebagai supervisor yang mengarahkan, membayarkan upah dan menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Kegiatan ini dalam DIPA BPPIKHL hanya melibatkan 5 orang per-tim tetapi pada kenyataannya dilapangan melibatkan semua anggota MPA agar tidak menimbulkan kecemberuan antar anggota. Daerah jelajah patroli mandiri dilaksanakan pada sekitar wilayah yang di anggap rawan kebakaran.

# e. Patroli Terpadu

Berbeda dengan kegiatan patroli mandiri, kegiatan patroli terpadu melibatkan aparat TNI dan POLRI, KPH, BBKSDA Papua Barat, Damkar Kota Sorong, BBTNTC, Distrik/ Kecamatan dan MPA. Dalam tim terbagi 2 yang beranggota masing-masing 6 orang. Kegiatan patroli terpadu dilaksanakan menggunakan roda 2 dengan daerah jelajah yang lebih luas dari patroli mandiri. Pelaporan yang ditemui dilapangan dilaporkan pada supervisor. Cakupan kegiatan patroli adalah jelajah daerah rawan kebakaran, sumber air, pengawasan terhadap masyarakat dan penyuluhan.



Gambar 9. Patroli Terpadu di Kebar (BPPIKHLMaluku Papua,2018)

# f. Partisipasi Masyarakat Peduli Api terhadap pencegahan Karhutla

Partisipasi masyarakat dalam pencegahan karhutla sangat dibutuhkan karena mereka berada dekat apabila terjadi karhutla sehingga dapat segera dipadamkan dan kebakaran tidak akan meluas. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari 55 responden, tingkat partisipasi amsyarakat sangat baik mencapai 90,91% dilihat dari keterlibatan dalam kegiatan pencegahan BPPIKHL Maluku Papua karena mereka merupakan anggota MPA yang sering dilibatkan dalam kegiatan pencegahan karhutla. BPPIKHL Maluku Papua menyediakan uang harian dari kegiatan tersebut sebagai wujub pemberi semangat dan dapat membantu ekonomi keluarga, hal tersebut menambah antusias dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara setelah terbentuk MPA, mereka menyatakan bahwa hanya sebagian anggota yang aktif dalam kegiatan pencegahan karhutla. Kegiatan pencegahan seperti patroli hanya mereka laksanakan apabila ada **BPPIKHL** kegiatan dari Maluku Papua, belum ada insiatif untuk melakukan kegiatan tersebut sendiri karena kendala trans-portasi. Mereka mengatakan bahwa hal yang perlu dilengkapi dalam kegiatan pencegahan karhutla yaitu peralatan pemadaman. patroli, pembinaan mereka harapkan menjadi prioritas BPPIKHL Maluku Papua keterampilan mereka dapat bertambah.

# g. Partispasi Pegawai BPPIKHL Maluku Papua dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Peranan pegawai BPPIKHL Maluku Papua sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan karhutla, karena memegang kendali atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan surat perintah tugas sehingga tidak semua pegawai yang dapat dilibatkan dalam kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara tingkat partisipasi yang pernah melaksanakan kegiatan pencegahan bagi pegawai Maluku Papua yaitu BPPIKHL 86,21% dan untuk wilayah provinsi Papua Barat mencapai 62,07%. Dari hasil persentase tersebut dapat dilihat pegawai BPPIKHL Maluku Papua sudah aktif dalam kegiatan pencegahan karhutla. Dan dari hasil wawancara juga tertuang keadaan lokasi pelaksanaan kegiatan dalam keadaaan kering dengan kontur bervariasi dari datar sampai bergunung-gunung. Kebanyakan bervegetasi yang mudah terbakar sehingga daerah tersebut seperti padang savanna, semak belukar sehingga disebut daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.

Pendapat pegawai BPPIKHL Maluku Papua 75,86% menjawab bahwa respon yang diberikan masyarakat

pemerintah daerah dan khususnya distrik/kecamatan sudah baik tetapi beberapa daerah yang dianggap responnya kurang dikarenakan tidak adanya pemberitahuan sebelum kegiatan. Ada beberapa kendala yang ditemui dilapangan berupa sarana dan prasarana yang kurang, akses menuju lokasi sulit, jauhnya dari sumber mata air dan komunikasi antar tim pelaksana. Pelaksanaan kegiatan pencegahan yang dilakukan sudah baik dan efektif, kegiatan yang dijadikan prioritas patroli yang dilakukan bersama masyarakat.

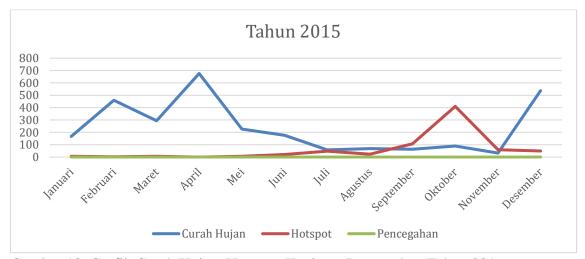
# Kegiatan pencegahan yang dilakukan BPPIKHL Maluku Papua terkait Hotspot dan Curah Hujan

Curah hujan merupakan unsur iklim yang memiliki korelasi tinggi dengan kejadian kebakaran hutan dan merupakan faktor yang paling tinggi dalam menentukan akumulasi bahan bakar (Syaufina 2008).

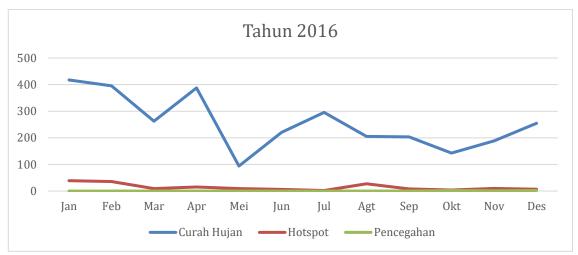
Pada tahun 2015, kebakaran sudah mulai terjadi pada bulan Juli ketika curah hu-

jan sudah berkurang dengan intensitas 58,5 mm3. Puncak kebakaran terjadi pada bulan oktober, dengan jumlah titik hotspot 410 dimana intensitas curah hujan 89 mm3. Pada tahun ini belum terbentuk BPPIKHL Maluku Papua sehingga belum ada kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Di tahun 2016 curah hujan terendah terjadi pada bulan mei yaitu 94 mm3 tetapi yang muncul hotspot sebanyak 9 titik. Pada tahun ini ratarata curah hujan tinggi menyebabkan jumlah hotspot berkurang. Berbeda jauh dengan jumlah hotspot yang ada pada tahun 2015. Kegiatan pencegahan dilakukan pada bulan November dan Desember. Sehingga belum memberikan pengaruh yang besar terhadap jumlah hotspot yang ada.



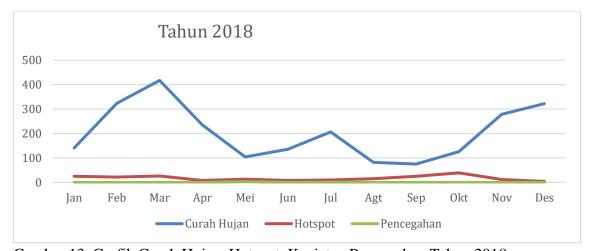
Gambar 10. Grafik Curah Hujan, Hotspot, Kegiatan Pencegahan Tahun 2016



Gambar 11. Grafik Curah Hujan, Hotspot, Kegiatan Pencegahan Tahun 2016



Gambar 12. Grafik Curah Hujan, Hotspot, Kegiatan Pencegahan Tahun 2017



Gambar 13. Grafik Curah Hujan, Hotspot, Kegiatan Pencegahan Tahun 2018

Tabel 2. Kegiatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (BPPIKHL Maluku Papua, 2019)

No	Nama Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Pelaksana
1	Patroli Terpadu	14 Kegiatan	MPA dan Instansi Terkait
2	Kampanye	8 Kegiatan	Pegawai BPPIKHL
3	Pembinaan MPA	3 Kegiatan (10 Desa)	Pegawai BPPIKHL
4	Inovasi Pencegahan Karhutla	4 Kegiatan	Pegawai BPPIKHL
5	Verifikasi Aksi Adaptasi	8 OT	Pegawai BPPIKHL

Pada tahun 2017, curah hujan terendah terjadi pada bulan September tetapi hotspot yang terpantau hanya 12 titik. Ditahun ini kegiatan pencegahan karhutla yang dilakukan BPPIKHL Maluku Papua berintesitas tinggi dengan didukung oleh MPA yang baru dibentuk, instansi terkait dan dana yang besar. Grafik hotspot tertinggi pada bulan Oktober terlihat ada 15 kegiatan yang dilaksanakan. Tetapi dibeberapa lokasi hotspot yang terpantau tidak dilakukan kegiatan pencegahan karhutla seperti wilayah Kabupaten Fakfak dan Teluk Bintuni. Kemudian pada bulan November dimana curah hujan yang hampir sama dengan curah hujan bulan Oktober terpantau terjadi penurunan hotspot, kegiatan yang dilakukan malah melebihi jumlah hotspot yang ada. Selanjutnya dibulan Desember hotspot dan kegiatan terlihat sama besar. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dikatakan kegiatan pencegahan tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat hotspot yang ada, tetapi perlu ada penelitian lanjutan untuk menjelaskan pengaruh tersebut.

Pada tahun 2018 dimana terdapat kondisi curah hujan yang sangat rendah pada bulan Agustus dan September. Terpantau hotspot meningkat dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober. Disisi lain kegiatan pencegahan merosot tajam, hanya ada 4 kegiatan pada bulan Mei dan Juli. Sehingga ini dapat menjadi perhatian bagi BPPIKHL Maluku Papua dalam merencanakan kegiatan pencegahan pada tahun berikutnya agar kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal dengan hasil terpantau denganmenurunnya jumlah hotspot.

## Rencana Kegiatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019.

Alternatif yang dapat dilakukan BPPIKHL Maluku Papua karena tidak ada kegiatan pembentukan MPA yaitu meningkatkan kerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dalam pembentukan MPA, sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun 2018 dengan melakukan pembentukan MPA di Fakfak dan Manokwari Selatan.

Kegiatan Inovasi Pencegahan Karhutla merupakan kegiatan baru yang memberikan pengetahuan tentang inovasi ramah lingkungan yang dapat dilakukan oleh anggota MPA. Inovasi ini diharapkan dapat menambah pendapatan dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

## Kebijakan Pencegahan Kebaka-ran Hutan dan Lahan

Kebijakan kebakaran hutan dan lahan sangat kompleks dan dinamis karena dipengaruhi faktor sosial, hukum, ekonomi dan politik. Kebijakan ini banyak mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan nomor: P.12/Menhut-II/2009 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Kebijakan yang diprioritas yaitu pelaksanaan pencegahan di tingkat tapak. BPPIKHL Maluku Papua telah melaksanakan kegiatan yang langsung ketingkat tapak melalui pembentukan MPA, patroli yang melibatkan masya-

rakat, penyuluhan dan kampanye yang dilakukan pada masyarakat yang di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.

Saat ini peraturan daerah Provinsi Papua Barat tentang kebakaran hutan dan lahan sementara dalam proses dan menunggu disahkan. BPPIKHL Maluku Papua ikut berpartispisi baik dalam sosialisasi maupun merumuskan dan mengoreksi naskah. Masalah mengenai penggunaan dana desa untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan program MPA yang diterapkan sebelumnya, merupakan fokus utama yang diusulkan agar ada dalam peraturan daerah tersebut. Hal ini berdasarkan pengusulan langsung dari aparat kampung, disisi lain dana pencegahan BPPIKHL Maluku Papua terbatas dan membaginya dalam luasan wilayah kerja mencakup 4 provinsi. Penggunaan dana ini nantinya perlu pendampingan dalam hal teknis pelaporan agar dapat dipertanggung jawabkan.

#### KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang didapat dari penulisan tesis ini sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan pencegahan karhutla meliputi pemantauan hotspot, pembentukan dan pembinaan MPA, patroli
  mandiri, patroli terpadu, kampanye dan
  sosialisasi karhutla sudah berjalan efektif
  berdasarkan pemantauan hotspot dan hasil wawancara tetapi masih ada beberapa
  hal yang perlu diperbaiki. Berdasarkan
  masukan hasil wawancara yang dijadikan
  prioritas dilapangan adalah kegiatan patroli yang melibatkan masyarakat dan
  pembinaan MPA.
- b. Apabila kegiatan pencegahan dilakukan secara intensive, dukungan dana yang besar, dukungan peralatan yang standard, dukungan masyarakat dan pemerintah terkait dengan waktu pelaksanaan yang tepat maka akan memperoleh hasil yang optimal dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan terpantaunya penurunan hotspot. Hal ini terlihat di tahun

- 2017, berdasarkan kegiatan pencegahan yang dikaitkan dengan curah hujan dan hotspot.
- c. Strategi yang dapat dilakukan oleh BPPIKHL Maluku Papua dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di provinsi Papua Barat sebagai berikut: memberikan pemberitahuan lanjutan ke perusahaan, melakukan kegiatan pencegahan kebakaran pada bulan Mei sampai dengan Juni, menginventarisasi isu permasalahan lingkungan setiap daerah, penguatan peranan dan peningkatan kapasitas MPA dan terus melibatkan masyarakat, kerjasama antar stakeholder yang terkait terus ditingkatkan, peningkatan kapasitas pegawai, mendorong disahkannya peraturan daerah tentang kebakaran hutan dan lahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, Wahyu Catur., Saharjo, Bambang Hero., Suryadiputra, dan Siboro, Labueni. 2005. *Pan*duan Pengendalian Hutan dan Lahan Gambut. Bogor: Wetlands International – Indonesia Programme
- Badan Standardisasi Nasional,2010 SNI 7645 : 2010 Klasifikasi Penutupan Lahan. Jakarta : BSN.
- BPS Papua Barat, 2016. *Papua Barat Dalam Angka Tahun 2016*. Manokwari
- BPPIKHL Maluku Papua,2017 *mx*. Manokwari
- Creswell, J.W. 2012. Research design. pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Deputi Bidang Penginderaan Jauh. 2016 Panduan Teknis (V.01)

- Informasi titik panas (hotspot) kebakaran hutan/lahan. Jakarta: LAPAN
- Fahmuddin Agus, I.G. Made Subiksa. 2008 Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan. Bogor.
- Hadiwijoyo, Surya Sakti. (2012). Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep). Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hadisuparto, H. 2003. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia. http://:www.kompas.com/kompascetak/0306/29/29/fokus/395705.html (3 Maret 2018)
- Jawad. A , Nurdjali.B, Widiastuti.T,2015

  Zonasi Daerah Rawan Kebakaran
  hutan dan Lahan di Kabupaten Kubu
  Raya Provinsi Kalimantan Barat.
  Pontianak: Jurnal Hutan Lestari Vol.3
  (1): 88-97
- Moleong, Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurdiana, Nina. (2014) *Teknik Sampling* Snowball Dalam Penelitian Lapangan Jakarta: Comtech.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/ 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.13/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.3/PPt/SET/ Kum.1/1/2018 tentang Pemben-tukan

- dan Pembinaan Masya-rakat Peduli Api
- Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.2/IV-SET/20 14: Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api.
- Pasaribu, S.M dan Friyatno, S. 2008

  Memahami Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta
  Upaya Penanggu-langannya:
  Kasus Di Provinsi Kalimantan
  Barat. Bogor
- Sutopo. P.N.2015 Analisis Luas Hutan dan Lahan Terbakar di Indonesia 2015. Jakarta: BNPD
- Solichin dan P. Kimman. 2007. Sistem Informasi Kebakaran. South Sumatra Forest Fire Management Project. Propinsi Sumatera Selatan.http://www.ssffmp.or.idssffmp?file/publication/sistem\_informasi\_kebakaran.pdf. (20 April 2018).
- Wahyunto, Suparto, Bambang H. Hasyim Bhekti. 2006 Sebaran Lahan Gambut, Luas dan Cadangan Karbon Bawah Permukaan di Papua. Bogor. Wetlands International Indonesia Programme
- Y.L Franky, Selwyn Morgan.2015 Atlas Sawit Papua: Di bawah Kendali Penguasa Modal. Jakarta .Pusaka.
- Yati Afiyanti, 2008 Penggunaan Literatur Dalam Penelitian Kualitatif, Jakarta
- Yonathan D, 2004 Studi Sebaran Titik Panas (Hotspot) Sebagai Indikator Kebakaran Hutan Dan Lahan di Provinsi Jambi. Bogor